



## Transparansi Pengelolaan Dana Musyawarah Desa Pertanggung Jawaban Tahunan (MDPT) Di Bumdesa Lancang Kuning Desa Rumbai Jaya

Nur Aisyah Mulyati<sup>1</sup>, Nurlaila<sup>2</sup>, Nuri Aslami<sup>3</sup>

Prodi Akuntansi Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : [nuraisyahmuulyatii0400@gmail.com](mailto:nuraisyahmuulyatii0400@gmail.com)<sup>1</sup>, [nurlaila@uinsu.ac.id](mailto:nurlaila@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>,

[nuriaslami@uinsu.ac.id](mailto:nuriaslami@uinsu.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstract** This research is aimed at finding out the Transparency of Management of Annual Responsible Village Deliberation Funds (MDPT) in BUMDesa Lancang Kuning, Rumbai Jaya Village. By using a qualitative approach supported by descriptive methods. Data was collected by interviewing, observing and documenting. This research uses data collection techniques by interviewing directors and secretaries regarding financial reports. A series of studies produced conclusions showing that the Annual Accountability Village Deliberation Fund Management (MDPT) was in accordance with SAK ETAP with the percentage of completion method recognized in reports from 2019 to 2021. BUMDesa Lancang Kuning Rumbai Jaya Village was guided by SAK ETAP in preparing the report because it makes performance easier and can help minimize errors in recording reports, which has a beneficial impact on the progress of the entity. BUMDesa will continue to try to be the best for financial reporting.

**Keywords:** Fund Management Transparency, Annual Accountability Village Deliberation (MDPT), SAK ETAP, BUMDesa

**Abstrak** Penelitian ini ditujukan untuk diketahuinya Transparansi Pengelolaan Dana Musyawarah Desa Pertanggung Jawaban Tahunan (MDPT) di BUMDesa Lancang Kuning Desa Rumbai Jaya. Dengan penggunaan pendekatan kualitatif didukung metode deskriptif. Data dikumpulkan dengan mewawancarai, pengobservasian dan pendokumentasian. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dengan mewawancarai direktur, sekretaris mengenai laporan keuangan. Serangkaian penelitian menghasilkan simpulan yang menampilkan jika Pengelolaan Dana Musyawarah Desa Pertanggung Jawaban Tahunan (MDPT) telah bersesuaian dengan SAK ETAP dengan metode persentase penyelesaian yang diakui pada laporan dari tahun 2019 sampai dengan 2021. BUMDesa Lancang Kuning Desa Rumbai Jaya berpedoman pada SAK ETAP dalam menyusun laporan keuangannya sebab kian memudahkan kinerja dan mampu membantu meminimalisir eror dicatatkannya laporan maka berimbas menguntungkan bagi majunya entitas. BUMDesa akan terus mencoba menjadi yang terbaik untuk laporan keuangan.

**Kata Kunci:** Transparansi Pengelolaan Dana, Musyawarah Desa Pertanggung Jawaban Tahunan (MDPT), SAK ETAP, BUMDesa

### PENDAHULUAN

Transparansi pengelolaan dana merupakan kegiatan agar membangun keyakinan dan kepercayaan masyarakat kepada BUMDesa / pemerintahan desa ialah perinstansian yang melayani publik dengan menjamin keprofesionalitasan dan bersihnya dari tidak kompetennya dan rawan aktivitas tindak pengkorupsian, pengkolusian dan nepotisme. Standar akuntansi nomor 71 tahun 2010 tentang transparansi yang penginformasian keuangannya diberikan kepada khayalak masyarakat luas secara terbuka. Hali ini berdasarkan peninjauan jika masyarakat berhak memperoleh pengetahuan keseluruhan dan transparan atas kebertanggungjawaban pemerintahan saat dikelolanya kebijakkan dan resource yang diamanahkan kepada mereka serta penaatannya akan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan BUMDesa seutuhnya dilakukan oleh masyarakat desa, yakni dari desa, oleh dan untuk desa. Pengopersian BUMDesa yakni dengan menjalankan penampungan aktivitas dan program ekonomi masyarakat pada sebuah bentuk kelembagaan ataupun perbadan usaha yang kompeten pengelolaannya, akan tetapi tetap berstandarkan pada keberpotensial asli desa. Sebab hal tersebut membuat pengusaha masyarakat kian tampak produktivitas dan ke-efektivitasannya. Usaha yang dioperasionalkan berdasarkan prinsip berkooperatif, berpartisipasi, beremansipatif, ketransparansian, keakuntabelan dan sustainable. Pada peningkatan standarisasi kehidupan perekonomian masyarakat salah satunya melalui Badan Usaha Milik Desa BUMDes. Perkembangan Badan Usaha Milik Desa ini mustahil bisa jauh lepas dari keadaan persaingan yang akan dihadapi pada pelaku-penggiat perekonomian lainnya. Pada pengelolaan dana MDPT BUMDesa menjelaskan ketransparansian dikelolanya keuangan, sejak tahap perancangan rencana, pengaktualisasian, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dengan dinilainya ketransparansian itu, didasarkan atas pengkriteriaan tersedianya, keaksesibilitasan, ketepatan waktu dan pengumpan balikkan atas penginformasian perihal mengelola akan penyajian keuangan. BUMDesa yang berkewajiban menggerakkan kesemua bentuk kebijakan putusan musyawarah desa. Serta dipatuhinya keseluruhan aturan berlaku pada penganggaran dasar BUMDesa, dilakukannya pempromosian dan pentransmisian keinformasian aktivitas yang dilaksanakan BUMDesa menunjukkan penginformasian berkaitan dengan penstatusan, pemodal dan kerjasama pada BUMDesa. Dan menyampaikan serta melaporkan perkembangan terkini secara berkala kepada pelaksana operasional. Musyawarah Desa Pertanggung Jawaban Tahunan (MDPT) ini merupakan gambaran kinerja Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Lancang Kuning bersama Unit-unit Usahanya dari tahun buku 2019 sampai dengan 2021. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas yang merupakan satu diantara barometer yang pengukurannya dapat dilakukan dengan disampaikannya pelaporan pertanggung jawaban yang mana pelaporan ini menunjukkan kepercayaan dan tanggung jawab yang dibebankan pada Pengurus terhadap anggota.

Adapun rincian dana musyawarah desa pertanggung jawaban tahunan di Desa Rumbai Jaya adalah sebagai berikut :

No.	Tahun	Masuk (Rp)	Keluar (Rp)
1.	2019	Rp. 407.500.000	Rp. 233.100.000
2.	2020	Rp. 414.500.000	Rp. 230.100.000
3.	2021	Rp. 414.500.000	Rp. 230.100.000

Mengelola BUMDesa maka hal terpenting adalah pelaporan. Kita mengetahui jika pelaporan keuangan untuk sektoral publik merupakan komponen esensial dalam penciptaan keakuntabilisan. Harapan besar dalam disampaikannya laporan keuangan sektor publik mampu dengan transparan sehingga pengaksesannya bisa dicapai siapa saja. Sebab sebagai satu prinsip didirikannya BUMDesa yakni memiliki sifat ketransparansian atau keterbukaan dalam memberikan penginformasian perihal kegiatan mengelola lembaga tersebut.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Transparansi**

Meisy Egi Yalti (2020) Transparansi ialah menyampaikan penginformasian perihal tahapan mengelola ataupun menyelenggarakan pemerintahan pada desa dengan keterbukaan dan kejujuran kepada semua masyarakat berdasar atas mempertimbangkan jika masyarakat mempunyai atau berhak untuk diketahuinya serta bisa diaksesnya penginformasian dengan keterbukaan menyeluruh terkait kebertanggung jawaban pemeruntahan dalam mengelola sumber daya yang diamanahkan padanya dan penaatannya kepada peraturan perundangan. Ketransparansian dalam menyelenggarakan pelayanan publik ialah keterbukaan, dimudahkan dan bisa oleh seluruh pihak yang memerlukan mengaksesnya secara akseptabel dan gampang dipahami semua warga masyarakat. Ketransparansian bisa memberikan jaminan pengaksesan ataupun bebasnya bagi tiap individu meraih perolehan penginformasian perihal event yang diselenggarakan pemerintahan, yakni info mengenai kebijakan, tahapan dibuat dan dilaksanakannya serta hasil pencapaian dari kebijakan itu. Ketransparansian dibentuk didasarkan atas dibebaskannya arus penginformasian.

### **Tujuan Transparansi**

Agustinus Salle (2017) disebutkan olehnya jika ketransparansian bertujuan untuk : a. Menampilkan peningkatan perasaan percaya (trusted).  
b. Demi mengefektifkan peningkatan pengawasan (controlling).  
c. Masyarakat berhak atas perolehan penginformasian dan pengetahuan akan hal tersebut.

### **Prinsip-prinsip Transparansi**

Enam (6) prinsip ketransparansian, diantaranya :

- a. Tersedianya penginformasian yang tidak sulit untuk memahamk dan dalam pengaksesannya terkait pemnginformasian pendanaan, tahap penyelenggaraan, dan wujud bantuan atau pemrograman lain.
- b. Tersedianya pembublikasian informasi dan tersedianya media yang bisa diakses atas informasi perihal tahapan aktivitas dan kedetailan keuangan

- c. Tersedianya pelaporan berkala dibersamai dokumen dan bukti terkait mendayagunakan sumber daya al pada proyek yang dikembangkan bisa khayalak umum (publik) mudah untuk mengaksesya.
- d. Tersedianya laporan tahunan terkait keuangan dan penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan oleh BUMDesa bersama penyerahan dokumen pembuktian.
- e. Tersedianya website ataupun media yang dimanfaatkan penggunaannya untuk memublikasikan aktivitas yang organisasi desa laksanakan.
- f. Tersedianya panduan pedoman untuk menyebarkan penginformasian.

### **Indikator-indikator Transparansi**

Pengindikotoran ketransparansian terdiri atas empat (4), yakni :

- a. Disediakan dan pengaksesan informasi memiliki kejelasan perihal ketransparansian perancangan rencana, prosedural, dan pertanggungjawaban.
- b. Tersedianya musyawarah yang mengikut sertakan warga masyarakatnya.
- c. Terbukanya tahapan pengelolaan.
- d. Terbukanya penginformasian perihal dokumen mengelola pendanaan.

### **Manfaat Transparansi**

Kebermanfaatn ketransparansian dilakukan, dirincikan yakni :

- a. Mampu menghadirkan rasa percaya timbal-balik diantara pemerintahan, masyarakat melalui informarsi yang disediakan dan dijamin mudahnya perolehan informasi terakurat dan memadainya tersebut.
- b. Pencegahan tindak pengkorupsian.
- c. Kian dimudahkan saat pengidentifikasian kelemahan dan kekuatan kebijakan.
- d. Peningkatan keakuntabilitan, maka masyarakat lebih bisa melakukan pengukuran performa kelembagaan.

### **Pengelolaan Dana**

Pasal 1 ayat 4 PERMENDAGRI (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUMDes didefenisikan sebagai upaya desa yang pembentukn dan pendiriannya, serta 14 pemodalan juga pengelolaan oleh pemerintahan desa dan warga masyarakatnya.

### **Musyawarah Desa Pertanggung Jawaban Tahunan (MDPT)**

Musyawarah desa pertanggung jawaban tahunan (MDPT) merupakan agenda yang dilaksanakan per tahunnya dengan kegiatab musyawarah akan pelaporan akhir tahunan, laba tahunan yang dibagi, bantuan dana sosial, dsb, penganugerahan nasabah terbaik, penyerahan door prize. BUMDesa ini didirikan bersamaan pengupayaan memperkuat kapasitas yang

mendapat dukungan dari kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang musti berpartisipasi memberikan wadah dan perlindungan kepada unit usaha masyarakat desa dari pengancaman kompetisi pemodal besar lainnya.

### **Pertanggung Jawaban Dana**

Pengintegrasiaan Pertanggungjawaban dana desa dengan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDes. Akan tetapi kelompok pelaksana desa diwajibkan atas pelaporan pelaksanaan dana desa berbentuk Laporan akhir tahunan penganggaran yang meliputi perkembangan penyelenggaraan pendanaan desa.

### **METODE PENELITIAN**

Pendekatan Penelitian Penelitian ini memakai metodologi deskriptif Kualitatif untuk mengakumulasi serta menyediakan informasi (Siti May Sarah T, M Ridwan, Rahmat Daim H 2023). Penegasan teknik pengkajian kuantitatif ialah pemetodologian penelitian berpositivis digunakan untuk pemelajaran kepopulasian atau penyampelan, pengakumulasian penginformasian lewat instrumental, dan pengujian penghipotesisan yang sebelumnya telah ada penganalisisan data statistik kuantitatif. (Sugiyono (2019:16). Sementara meneliti dengan metodologi deskriptif ialah jawaban atas pertanyaan keberpengarugan mono pada variabel bebas (independen) atau hanya memiliki keberpengaruhan pada satu variabel atau lebih.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengelolaan Dana Musyawarah Desa Pertanggung Jawaban Tahunan (MDPT) di BUMDesa Lancang Kuning Desa Rumbai Jaya. Pengelolaan dana (funds management) merupakan aktivitas mengelola pendanaan pribadi dan pendanaan eksternal yang perolehannya diraih dari kelembagaan lainnya bertujuan agar dimaksimalkannya laba (keuntungan) dan tetap melakukan pemeliharaan atas ketersediaan likuiditas dan keinginan dalam berinvestasi. Sedangkan untuk musyawarah desa pertanggung jawaban tahunan (MDPT) ialah pemaparan laporan pertanggung jawaban BUMDesa Lancang Kuning pertahunnya, pemapran rencana kerja BUMDesa Lancang Kuning di tahun berikutnya dan berdiskusi apa yang akan di lakukan lagi di tahun selanjutnya.

Transparansi Pengelolaan Dana Musyawarah Desa Pertanggung Jawaban Tahunan (MDPT) Di BUMDesa Lancang Kuning Desa Rumbai Jaya Ketransaparansian merupakan terbukanya dalam tahapan perancangan, disusunnya dan dilaksanakannya penganggaran daerah. Ketransaparansian memaknai jika keanggotaan masyarakat mempunyai hak dan pengaksesan yang merata untuk dapat diketahuinya tahap penganggaran dikarenakan

bersangkutan dengan pengaspirasian dan keberpentingan masyarakat terkhusus dipenuhinya kebutuhan warga masyarakat. Sementara ketransparansian pelaporan keuangan pada BUMDesa merupakan perihal yang terpenting dan pastinya dibutuhkan agar diketahui sejauh apa usaha BUMDesa dikembangkan. Selain itu pula, penyampaian terkait keuntungan penjualan, laba-rugi ataupun struktural pemodalan.

## **KESIMPULAN**

Bahwasannya keberkaitan diantara ketransparansian pihak yang mengelola laporan keuangan BUMDesa Lancang Kuning terhadap dilaporkannya dana MDPT yakni disaat menyajikan tiap-tiap laporan perbulan, setengah tahun dan tahunan diakhir. Pelaporan yang di buat BUMDesa akan bersesuaian dengan data dana MDPT yang dilaporkan dan akan di pertanggung jawabkan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) ataupun pelaporan terhadap inspektorat yang disumbangkan untuk PAD. Perolehan data-data penelitian di lapangan mendukung kuatnya simpulan yang dihasilkan yakni hasil maksimalisasi dari aktivitas mewawancara, dan dimudahkannya pengaksesan untuk diperolehnya data sekunder ataupun berbentuk dokumen laporan-laporan yang harus ditanggungjawabkan oleh BUMDesa ataupun Desa Rumbai Jaya.

## **SARAN**

1. Penjagaan hubungan yang senantiasa diupayakan baik tercipta bagi pemerintahan Desa Rumbai Jaya, Penanggung Jawab BUMDesa, pihak BPD serta warga masyarakatnya.
2. Penting upaya untuk dipertahankan dan ditingkatkannya keproduktivitasan performa pengkinerjaan sehingga mutunya kian optimal di masa mendatang.
3. Perlunya pendukungan intensif kepada Pengelola BUMDesa Lancang Kuning yang menjadi suatu amanah dan peran bersama untuk BUMDesa memiliki referensi pengelolaan kian baik kedepannya.
4. Bagi para akademisi untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat melakukan kajian yang lebih mendalam dan lebih luas mengenai Transparansi Pengelolaan Dana Musyawarah Desa Pertanggung Jawaban Tahunan (MDPT) Di BUMDesa Lancang Kuning Desa Rumbai Jaya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Siti May Sarah Tinambunan, M Ridwan, R. D. H. (2023). Analisis Kinerja Pengelolaan Dana Berdasarkan Value For Money Didesa Sitio-Tio Hilir Kabupaten Tapuli Tengah.

- Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi*, 4, 1222–1234.
- Meisy Egi Yalti. (2020). *Transparansi Pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah*. 1–97.
- Salle, A. (2017). *Makna Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Siti May Sarah Tinambunan, M Ridwan, R. D. H. (2023). Analisis Kinerja Pengelolaan Dana Berdasarkan Value For Money Didesa Sitio-Tio Hilir Kabupaten Tapnuli Tengah. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi*, 4, 1222–1234.